

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Warga negara dapat mendapatkan pendidikan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Masing-masing jalur pendidikan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah, pendidikan non-formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal terutama berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, ketiga jalur pendidikan tersebut harus saling mendukung dan memperkaya satu sama lain, sehingga tercipta keselarasan dan kesesuaian dalam pelaksanaan pendidikan.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan situs web Pusat Standar dan Kebijakan Pemerintah permasalahan anak tidak sekolah (ATS) merupakan isu global yang sangat mendesak untuk segera ditangani. Ironisnya, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan jumlah anak tidak sekolah terbesar di Asia Tenggara, yaitu mencapai 3,9 juta anak usia sekolah pada tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Chief of Education UNICEF Indonesia, Katheryn Bennett, dalam sebuah webinar bertema "Pendidikan Nonformal sebagai Jalur Pendidikan Alternatif bagi Anak Putus Sekolah di Indonesia." Webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia pada tanggal 3 September 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih serius terhadap akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anak di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah anak tidak sekolah di DKI Jakarta dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Persentase anak laki-laki yang tidak bersekolah pada kelompok umur 16-18 tahun

tercatat sebesar 0,11%, sedangkan anak perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun mencapai 1,3%. Secara keseluruhan, persentase anak tidak sekolah pada rentang usia 7-12 tahun adalah 0,65%, sementara pada kelompok usia 16-18 tahun sebesar 0,06%.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 angka anak yang tidak bersekolah berdasarkan jenjang pendidikan dan wilayah tempat tinggal, di perkotaan adalah 0,32% untuk SD, 5,82% untuk SMP, dan 18,50% untuk SMA. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 menurut jenis kelamin, angka anak yang tidak bersekolah untuk SD adalah 0,68% pada laki-laki dan 0,66% pada perempuan. Untuk SMP, angka 7,97% pada laki-laki dan 5,86% pada perempuan. Sedangkan untuk SMA, angka anak yang tidak bersekolah adalah 23,78% pada laki-laki dan 19,42% pada perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, persentase secara keseluruhan, jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di Jakarta Utara mencapai angka 5,21%.

Fenomena Pekerja Seks Komersial, diperkirakan sudah ada sejak lama seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Keberadaannya sering menimbulkan dilema. Selain itu, Pekerja Seks Komersial dianggap sebagai pilihan hidup yang tak terhindarkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat kemiskinan. Profesi ini dianggap sebagai bentuk patologi sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial. Saat ini, banyak pekerja seks komersial di Indonesia yang memilih pekerjaan ini karena tekanan ekonomi. Kebanyakan dari mereka, terutama perempuan, terpaksa menjalani profesi ini untuk menghidupi keluarga di tengah era masyarakat konsumtif. Meskipun ada peluang pekerjaan lain, mereka lebih memilih menjadi pekerja seks komersial. Banyak pekerja seks komersial di Indonesia yang sudah menikah dan memiliki anak, dengan beberapa ibu yang memilih pekerjaan ini karena alasan keuangan, bahkan ada yang mendapat dukungan dari suami mereka (Nur & Mukramin, 2023).

Sekitar 50 pekerja seks komersial di Kampung Baru teridentifikasi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa dari mereka tinggal di wilayah tersebut, sementara yang lain hanya datang pada malam hari untuk bekerja, khususnya

di area bawah jembatan Kampung Baru. Lokasi ini dipilih sebagai tempat bekerja karena tergolong sepi dan kurang mendapat pengawasan, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan aktivitasnya dengan lebih leluasa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat sekitar 20 anak dari pekerja seks komersial tidak sekolah di Kampung Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Anak-anak dari pekerja seks komersial menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan formal, salah satunya disebabkan oleh kuatnya stigma dan diskriminasi sosial yang masih melekat di masyarakat. Selain itu, mereka juga tidak memiliki dokumen administratif yang diperlukan atau telah menerima informasi yang tidak benar terkait keberadaan dokumen tersebut, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, yang menjadi syarat utama untuk dapat mendaftar ke sekolah. Bahkan, sebagian dari anak-anak ini tidak mengetahui secara pasti identitas orang tua kandungnya. Kondisi ini mencerminkan rendahnya pemahaman serta kurangnya kepedulian dari orang tua dan masyarakat sekitarnya terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan. Di samping itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan yang menghambat mereka untuk bersekolah, karena anak-anak dari pekerja seks komersial hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti seragam, perlengkapan sekolah, hingga uang sekolah itu sendiri. Angka ini menjadi perhatian karena usia tersebut seharusnya termasuk dalam masa wajib belajar pendidikan dasar. Dengan kondisi ini, penelitian mengenai anak yang tidak sekolah menjadi penting untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

Kondisi anak-anak pekerja seks komersial yang tidak bersekolah di Kampung Baru menunjukkan bahwa hambatan ekonomi, sosial, dan administratif menjadi faktor utama yang menghalangi akses pendidikan mereka. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Ida Arlinda, Sri Yatun, Abdul Wahab Syahrani, Zaenab Hanim pada tahun 2023 yang berjudul "*Strategi Pengembangan Kualitas Pendidikan Non Formal di PKBM Bunda Samarinda*" menyatakan bahwa PKBM Bunda menerapkan strategi program pendidikan gratis karena pendekatan

pembelajaran di lingkungan sekitar belum cukup efektif, dan faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat enggan melanjutkan pendidikan, selain faktor keluarga.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh penelitian Gaguk Wahyu Puspito, Tatik Swandari dan Mauhibur Rokhman pada tahun 2021 yang berjudul *“Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal”* menyatakan bahwa sebelumnya terdapat banyak calon peserta didik ragu mengikuti pendidikan kesetaraan karena khawatir akan biaya. Sejak tahun 2019, PKBM Wana Bhakti di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, menerapkan strategi berupa program pendidikan gratis untuk Paket A, B, dan C hingga peserta lulus dan memperoleh ijazah. Strategi ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan non-formal di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Minggu, 27 Desember 2024. Rumah Belajar Merah Putih merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial-pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan. Rumah Belajar Merah Putih juga menyediakan ruang belajar pertama bagi anak dari pekerja seks komersial yang tidak sekolah. Pendidikan alternatif ini dirancang untuk memastikan anak dari pekerja seks komersial tetap memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Rumah Belajar Merah Putih berdiri pada tahun 2006. Rumah Belajar Merah Putih awalnya didirikan sebagai taman bacaan sederhana yang kemudian berkembang menjadi sebuah rumah belajar. Rumah Belajar Merah Putih berdiri karena dilatarbelakangi oleh banyaknya pekerja seks komersial yang kurang peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka, sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, sementara semangat anak-anak tersebut terhadap pendidikan sangat besar. Mereka penuh antusiasme untuk belajar dan mengejar impian, namun terhalang oleh berbagai tantangan yang ada di lingkungan mereka. Problematika pendidikan di masyarakat setempat sangat kompleks, meliputi kurangnya akses terhadap dokumen penunjang yang harus dipenuhi, kondisi perekonomian keluarga menengah ke bawah yang berdampak pada kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak, serta pola pikir tradisional masyarakat

yang menjadi salah satu faktor utama minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Rumah Belajar Merah Putih hadir untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dari pekerja seks komersial yang tidak dapat bersekolah. Dengan pendekatan inklusif, pendidikan alternatif ini berfungsi sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung perkembangan anak-anak, serta membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, program ini memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif dari stigma sosial yang sering ditujukan kepada anak-anak yang berasal dari lingkungan tersebut.

Peserta didik Rumah Belajar Merah Putih terdapat 12 anak tidak bersekolah dan berasal dari keluarga dengan latar belakang Pekerja Seks Komersial. Anak tersebut tidak ada yang bekerja menjadi pekerja seks komersial. Kebijakan ini didasarkan pada peraturan yang diterapkan oleh Rumah Belajar Merah Putih, anak-anak yang menjadi binaan tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan yang disediakan tetap kondusif serta mendukung perkembangan anak secara moral, sosial, dan akademik. Dari anak yang terdapat masih banyak anak-anak yang tidak bisa membaca, menulis, berhitung. Pendidikan pertama bagi anak tidak sekolah yang dilakukan oleh Rumah Belajar Merah Putih melalui 2 program yaitu program umum dan khusus. Program umum berupa PAUD, Paket kesetaraan yaitu paket A – C, serta Program khusus yaitu bimbingan konseling.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik mengkaji strategi Rumah Belajar Merah Putih dalam menyediakan pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga Pekerja Seks Komersial yang tidak sekolah. Pendidikan Luar Sekolah memiliki keterkaitan erat dengan Ilmu Pengetahuan Sosial karena keduanya berfokus pada interaksi sosial dalam masyarakat. Pendidikan Luar Sekolah bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi individu yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, terutama mereka yang menghadapi hambatan sosial dan ekonomi.

Dalam kajian Ilmu Pengetahuan Sosial, fenomena ini termasuk dalam isu sosial yang memengaruhi pembangunan manusia dan kesetaraan pendidikan. Pendidikan yang merata menjadi bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan, sehingga Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan dalam Rumah belajar Merah Putih berperan sebagai agen perubahan dalam mengatasi masalah sosial yang ada, maka peneliti mengangkat judul penelitian “strategi Rumah Belajar Merah Putih dalam menjalankan program pendidikan non-formal bagi anak dari pekerja seks komersial yang tidak sekolah”.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dari itu batasan masalah pada penelitian ini adalah strategi Rumah Belajar Merah Putih dalam menjalankan program pendidikan non-formal bagi anak dari pekerja seks komersial yang tidak sekolah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dari itu masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Rumah Belajar Merah Putih dalam menjalankan program pendidikan non-formal bagi anak dari pekerja seks komersial yang tidak sekolah?
2. Apa hambatan yang dihadapi Rumah Belajar Merah Putih dalam menjalankan program pendidikan non-formal bagi anak dari pekerja seks komersial yang tidak sekolah?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan ilmiah terkait strategi Rumah Belajar Merah Putih

dalam menjalankan program pendidikan non-formal bagi anak dari pekerja seks komersial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti lain yang berminat melakukan kajian serupa di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi para praktisi pendidikan dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan program pendidikan non-formal yang lebih efektif, khususnya untuk mendukung perkembangan anak dari pekerja seks komersial yang tidak sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian kedepannya, serta menjadi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang sosial dan pendidikan yang memberikan pedoman praktis untuk mengembangkan program pendidikan serupa, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas.

b. Bagi Akademisi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang mengembangkan studi sosial dan pendidikan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait strategi rumah belajar dalam menangani masalah sosial yang serupa.